

## **Forum Freedom 62, 24 Juli 2006**

Tema: Liberalisme & Keadilan

Nara sumber : Akhmad Sahal

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom....

### **Hamid Basyaib (HB)**

Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Acara ini terselenggara atas kerjasama Freedom Institute Jakarta dan KBR 68 H, dan disiarkan ke 50-an radio lain di seluruh Indonesia. Tamu saya pagi ini saudara Ahmad Sahal. Ia lulusan New York University. Ia sebentar lagi melanjutkan studinya di University of Pennsylvania untuk meraih gelar Ph.D. Ia sedang mendalami filsafat politik. Karena itu saya akan berbincang dengannya di seputar tema umum liberalisme. Hanya sekarang lebih menitikberatkan pada persoalan keadilan. Ini tema yang sangat penting tapi jarang sekali dibahas. Kita tahu bahwa liberalisme itu semata-mata dikaitkan dengan individu atau individualisme. Yang sinis malah terlalu jauh menariknya menjadi egoisme. Intinya paham liberal itu adalah paham yang tidak mempedulikan orang lain atau masyarakat umum. Karena tumpuannya justru pada individu. Lawannya, misalnya varian kiri seperti Marxisme, justru terlalu menekankan pada aspek umum atau aspek masyarakat—keadilan sosial. Karena itu Marxisme dianggap tidak mendukung gagasan individualisme atau individuasi manusia. Paham itu pun dianggap tidak mendukung kebebasan manusia. Pertanyaan pertama saya: ada anggapan bahwa liberalisme itu tidak peduli pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Lalu sejauhmana kebenaran anggapan itu?

### **Ahmad Sahal (AS)**

Sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sejarah, tuduhan atau kritikan kaum marxis (yang mengatakan) bahwa liberalisme tidak sensitif pada keadilan itu tidak sepenuhnya benar meskipun bisa dimengerti dari aspek sejarahnya. Tidak sepenuhnya benar karena kalau kita lihat sejarah kelahiran liberalisme atau tatanan liberal itu justru lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak milik dari tirani monarki pada saat itu. Kita kan bicara tatanan liberal Abad 17, terutama di Inggris. Waktu itu bagaimana kaum liberal berusaha untuk menciptakan tatanan dalam bentuk *rule of law*, atau sistem yang konstitusional untuk melindungi hak-hak individu atau hak-hak warga dari tirani monarki, dari kesewenang-wenangan rejim kerajaan, dst. Jadi semangat dasar dari liberalisme adalah anti ketidakadilan.

### **HB**

Jadi mereka menegaskan individualismenya bukan (tidak) dalam kaitannya dengan orang lain. Bukan horizontal tetapi vertikal. Karena kerajaan pada saat itu memiliki segalanya dan hak individu tidak diakui?

**AS**

Betul. Dan misalnya kita melihat salah satu pemikir utama dari liberalisme, seperti John Locke. Ia pemikir liberal Inggris Abad 17. Ia bilang bahwa salah satu tujuan dari pemerintahan adalah melindungi *private property*, yang sekarang kita terjemahkan sebagai hak milik. Tetapi harus kita ingat bahwa pengertian *property* saat itu, kalau dia bilang bahwa tujuan negara adalah melindungi *private property*, maksudnya tujuan negara itu bukan untuk menyelamatkan jiwa manusia sebagai klaim yang sering dipakai oleh monarki religius. Monarki religius atau monarki berdasarkan agama kan menganggap bahwa pemerintahan itu tujuannya untuk menyelamatkan iman seseorang. Kalau John Locke sendiri menganggap tujuan negara itu sangat sekuler: menyelamatkan hak milik. Dan hak milik di sini mencakup hak-hak individu, hak personal, maupun hak politik. Itu duduk perkaranya. Dari situ kita bisa lihat bahwa liberalisme itu pada dasarnya anti ketidakadilan. Makanya saya bilang bahwa tuduhan kaum marxis itu tidak sepenuhnya benar.

Tetapi kalau kita lihat perjalanan liberalisme, terutama di Eropa pada Abad 19, ini terkait dengan *commerce*, perdagangan, kapitalisme, dst. Pada saat itu kelas pekerja betul-betul berada dalam tahap tereksplorasi. Jadi apa yang dikatakan kalangan sosialis sebagai 'eksploitasi manusia atas manusia' itu memang terjadi, sehingga kaitan antara liberalisme, kapitalisme dan penindasan itu kuat sekali. Tetapi itu hubungan yang tidak niscaya. Karena di tempat lain seperti di Amerika, liberalisme tumbuh subur tetapi tidak ada eksploitasi manusia atas manusia seperti di Eropa.

Hal kedua yang juga masuk akal kenapa kaum marxis menuduh liberalisme sebagai anti keadilan atau hanya pro kebebasan individu adalah karena liberalisme dan kapitalisme berhubungan erat dengan imperialisme. Makanya kita lihat para *founding fathers* kita misalnya hampir semuanya sosialis. Atau paling tidak mendalami pemikiran-pemikiran kiri. Karena hanya itu satu-satunya alat yang saat itu tersedia untuk melawan imperialisme. Padahal kalau kita lihat, kaum liberal yang anti imperialisme itu banyak sekali. Diderot, Voltaire, dan Adam Smith sendiri sangat anti terhadap imperialisme. Artinya hubungan antara liberalisme dan imperialisme itu tidak niscaya. Kaum liberal bisa sangat anti imperialis, sebagaimana kaum sosialis bisa sangat anti imperialis juga. Jadi ada faktor-faktor sejarah yang memang menjadikan kita memaklumi tuduhan bahwa liberalisme itu seakan-akan tidak pernah sensitif terhadap rasa keadilan, itu bisa sangat dimengerti. Tetapi bukan berarti benar.

**HB**

Tetapi orang menerjemahkan (liberalisme) sebagai suatu tindakan atau keputusan yang bernuansa tidak adil. Apakah secara teoritis (jawaban atas ketidakadilan) itu disediakan oleh pemikir liberal? Kenapa orang begitu salah paham dalam memahami liberalisme?

**AS**

Kalau kita bicara aspek teoritis, menurut saya, sebenarnya perdebatan yang hangat dalam 40 tahun terakhir di kalangan kaum liberal terutama di Amerika itu justru soal keadilan. Jadi soal seberapa jauh misalnya sebuah negara berperan dalam mengatur hak-hak individu. Inti utama dari liberalisme itu kan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak milik. Nah seberapa jauh negara itu berperan serta dalam persoalan ini (hak-

hak individu), itu menjadi pokok perdebatan yang betul-betul seru di dalam pemikiran politik liberal. Jadi tema keadilan itu menjadi sesuatu yang sangat seksi.

**HB**

Atau punya porsi yang besar?

**AS**

Betul. Contoh yang bisa kita kemukakan di sini misalnya perdebatan seru antara mazhab John Rawls dan mazhab libertarian yang diprakarsai oleh Robert Nozick dan Milton Friedman, dst. Kaum libertarian berpendapat bahwa tujuan utama atau yang pokok dari liberalisme adalah perlindungan hak-hak individu dari agresi di luar individu (negara, masyarakat, dst). Karena itu konsep negara kaum libertarian adalah apa yang disebut *minimal state*, negara minimal, atau sering juga disebut sebagai negara penjaga malam. Dalam arti semakin sedikit campur tangan negara terhadap kehidupan warga, itu semakin bagus.

**HB**

*The best government is the least government?*

**AS**

Betul. Nozick, salah seorang professor di Harvard University, merumuskan bahwa peran negara adalah melindungi warga dari pencurian, kekerasan, dan penipuan, dan juga menjamin hubungan-hubungan kontrak antar masyarakat. Ya, sebatas itu saja.

**HB**

Tadi Ahmad Sahal bilang bahwa liberalisme tidak memusuhi keadilan. Liberalisme pun tidak hanya bertumpu pada individualisme, tetapi pada sejarah awalnya liberalisme ingin membebaskan dan melindungi hak-hak individu dari cengkraman pihak luar. Dalam hal ini kerajaan Inggris Abad 17 yang menganggap semua yang ada di tanahnya adalah milik kerajaan, bukan milik individu. Liberalisme, menurut Sahal, justru untuk melindungi itu. Walaupun pada perkembangan berikutnya liberalisme dianggap berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan. Sekarang tahap pembahasannya menyangkut John Rawls dan Nozick. Tadi Sahal bilang bahwa Rawls menganggap bahwa untuk menciptakan kebebasan atau mengalami pembebasan, masyarakat harus menciptakan *means of freedom*. Karena pada dasarnya adalah ketidaksetaraan...

**AS**

Itu yang mengatakan bukan John Rawls. Itu saya ambil dari new deal Roosevelt (?).

**HB**

Roosevelt di tahun 30-an. Ketika perekonomian Amerika *malaise* atau runtuh, lalu Presiden Roosevelt muncul dengan doktrinnya yang disebut dengan new deal. Artinya peran pemerintah adalah memberi sarana-sarana kebebasan bagi rakyatnya...

**AS**

Saya mendasarkan diri pada bacaan Profesor Ian Shapiro dari Yale terhadap John Rawls. Ia bilang bahwa John Rawls ini disemangati oleh new deal. Karena menurut Rawls, sebuah tatanan itu bisa dikatakan adil kalau memenuhi dua syarat. Satu, tatanan itu harus menjamin agar setiap orang punya hak yang sama untuk merealisasikan potensi-potensi dirinya, punya hak yang sama dalam berserikat, berkumpul, berpendapat, dst. Singkat

kata, setiap orang punya hak yang sama dalam hak politik maupun hak sipil. Jadi setiap orang mempunyai hak sama. Itu postulat pertama. Postulat kedua, ketidaksetaraan itu dibolehkan asalkan yang diuntungkan adalah orang-orang yang terpinggirkan (*the disadvantage*). Kaum minoritas, marjinal, dst. Jadi menurut dia, sebuah tatanan disebut adil kalau memenuhi dua postulat itu.

Postulat itu harus dibaca urut. Jadi urutan pertama, tatanan itu harus menjamin semua orang (punya hak) untuk menikmati hak-hak sipil dan politik secara sama.

**HB**

Jadi itu *equal opportunity*...

**AS**

Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi yang kedua, ini justru menjadi titik perbedaan dengan mazhab libertarian. Dia mengatakan bahwa tatanan yang tidak sama itu dibolehkan kalau yang diuntungkan adalah *the disadvantage*, masyarakat yang terpinggirkan, kaum minoritas. Ini kan mensyaratkan campur tangan negara...

**HB**

Supaya yang *the disadvantage* tadi punya akses yang sama?

**AS**

Jadi menurut Ian Shapiro, pemikiran John Rawls di dalam bukunya 'Theory of Justice' itu terkait dengan konteks new deal-nya Roosevelt. Bahwa orang tidak mungkin merealisasikan kebebasan kalau dia tidak punya sarana-sarana kebebasan.

**HB**

Saya kira dari segi filosofis betul-betul berbeda?

**AS**

Ya. Karena yang satu, mazhab libertarian, semangatnya adalah liberalisme awal.

**HB**

Berarti mereka tidak mengenal istilah *means of freedom*. Karena kebebasan itu adalah prasarat, bukan sarat...

**AS**

Betul. Jadi kebebasan itu justru alas (substance?) dari segala sesuatu...

**HB**

Kalau begitu, yang diinginkan Rawls alasnya disediakan?

**AS**

Ya. Atau paling tidak, negara itu membikin supaya kelompok *the disadvantage* itu tidak semakin terpinggirkan. Ini saya kira mendasari kebijakan *affirmative action*...

**HB**

Siapa saja kelompok *the disadvantage* yang disebut Rawls itu? Apakah etnis agama, minoritas?

**AS**

Setahu saya, Rawls tidak menyebutkan secara detil. Tetapi biasanya orang mengaitkannya dengan kaum kulit berwarna, imigran, kelompok gay, dst. Pokoknya kelompok-kelompok yang tidak menjadi arus utama masyarakat Amerika.

**HB**

Termasuk misalnya pedagang kaki lima, pedagang kecil...

**AS**

Saya tidak tahu persis. Tapi saya kira iya. Saya kira itu termasuk bagian dari *the disadvantage*. Memang ini suatu istilah yang akan menjadi panjang/controversial kalau kita berbicara lebih jauh. Tetapi inti yang ingin saya kemukakan adalah bahwa dalam kubu liberal itu tema keadilan menjadi sangat penting, dan pokok persoalannya bukan dalam tataran yang sering dikemukakan oleh kaum sosialis, bahwa keadilan itu adalah persamaan dalam hasil. Tapi keadilan itu adalah persamaan dalam hak. Masalahnya adalah seberapa jauh negara berperan atau turut serta dalam merealisasikan persamaan hak itu.

**HB**

Anda sempat menyinggung *affirmative action*. Saya ingin melanjutkannya. Ini terkait sekali. Artinya, banyak orang yang berpikir begitu. Bahwa kalau misalnya kelompok lemah dan kelompok kuat dibiarkan bertarung bebas, maka yang lemah akan semakin kalah. Mengapa? Karena mereka bilang bahwa garis start-nya saja sudah berbeda. Itu terjadi sejak 25 tahun lalu di Amerika Serikat. Orang hitam dianggap lemah, dan kalau dibiarkan berkompetisi secara bebas di masyarakat, mereka tidak akan menang. Karena itu dikasih (peluang?). Di Malaysia pun begitu, terutama bagi pengusaha pribumi. Karena Cina di sana terlalu kaya dan pribumi kalah terus, maka pemerintah Malaysia memberi (kesempatan/peluang) bagi pengusaha pribumi. Masalahnya sekarang *affirmative action* pun sudah dianggap gagal...

**AS**

Dalam dosis tertentu *affirmative action* mungkin diperlukan. Tapi seberapa jauh/lama kita bisa memakai *affirmative action*. Karena itu bisa problematis. Problematisnya adalah misalnya kebijakan *affirmative action* itu sebenarnya bisa menciptakan ketidakadilan baru. Misalnya karena saya orang dari kelompok mayoritas, kelompok arus utama masyarakat, dan saya berprestasi, maka saya tidak mendapatkan hak yang mestinya saya peroleh. Karena ada kelompok dari suku terasing yang kemampuan dan prestasinya jauh di bawah saya, dan atas nama *affirmative action*, mereka mendapatkannya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa *affirmative action* itu juga menciptakan ketidakadilan baru. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat kasus di Amerika. Apa yang disebut sebagai visi atau *political correctness*, itu menjadi problem tersendiri.

**HB**

Misalnya saya orang kulit putih yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi atasan orang kulit hitam. Lantas orang kulit hitam itu melakukan kesalahan. Tetapi saya takut dan enggak bisa marah karena yang melakukan kesalahan itu orang kulit hitam. Dan ketika saya memarahi bawahan yang berkulit hitam itu, dia malah bilang, "Mentang-mentang saya berkulit hitam, dia berlaku seenaknya..." Padahal saya tak bermaksud ke arah itu. Ini bukan karena alasan kulit hitam dan putih. Ini alasan profesionalitas. Begitu?

**AS**

Ya. Itu salah satu contoh. Tapi banyak hal yang menunjukkan ketidakfajaran itu.

**HB**

Padahal rentangnya luas sekali. Mungkin saja Anda kulit putih tapi tak memiliki apa-apa...

**AS**

Kembali ke pokok persoalan. Jadi soal keadilan ini menjadi satu topik yang betul-betul ditanggapi serius oleh kaum liberal, dan mereka menghubungkannya dengan seberapa jauh negara berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Itu pokok persoalannya.

**HB**

Anda ingin menegaskan bahwa liberalisme itu bukan anti keadilan..

**AS**

Sama sekali bukan. Jadi kalau kita simpulkan, dari segi sejarah saja liberalisme lahir untuk melawan tatanan yang tidak adil. Semangatnya justru anti terhadap tirani, anti terhadap ketidakadilan. Itu pertama. Kedua, hubungan liberalisme dan penindasan, liberalisme dan imperialisme itu tidak niscaya. Ketiga, kaum liberal akhir-akhir ini (40-50 tahun terakhir ini) justru terus berdebat dan bergulat mengenai topik keadilan...

**HB**

Waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita bisa berbincang di waktu lain. Karena banyak agenda yang terbuka. Misalnya pertanyaan saya: kalau benar apa yang dikatakan Anda, mengapa banyak kesalahpahaman terhadap liberalisme. Liberalisme dianggap seakan-akan alat penindasan, individualisme ekstrim, dsb. Tapi waktunya habis. Dengan begitu, berakhirlah Forum Freedom kita pagi ini. Wassalam...

